

Buletin AIPJ3

Edisi 3 | JANUARI 2026



Bersama-sama Mewujudkan: Memulai Tahap Implementasi di 2026

Arahan Untuk 2026: Pertemuan Komite Manajemen Kemitraan Yang Pertama

Selamat tahun baru kepada semua mitra dan pemangku kepentingan!

Menjelang akhir 2025, AIPJ3 menyelenggarakan pertemuan Komite Manajemen Kemitraan (*Partnership Management Committee*) pertama pada 26 November 2025. Perwakilan dari tim Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Kedutaan Besar Australia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tim program AIPJ3, dan DT Global berpartisipasi dalam pertemuan ini.

Acara syukuran (tumpengan) di kantor AIPJ3 mengawali pertemuan, sebagai simbol kesiapan kemitraan untuk melangkah maju ke 2026. Diskusi pada sesi pertemuan berfokus pada arah strategis AIPJ3, pembaruan Strategi Keterlibatan, dan kemajuan dalam pengembangan Pedoman Tata Kelola.



Perwakilan dari DFAT, Bappenas, DT Global, dan anggota tim AIPJ3 pada acara tumpengan di kantor AIPJ3

Menjelang berakhirnya Tahap Awal, tim AIPJ3 kini sedang mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Tiga Tahun 2026-2028. Rapat Dewan Kemitraan yang akan berlangsung pada Maret 2026 akan membahas persetujuan Rencana Kerja Tahunan, mengesahkan Pedoman Tata Kelola, dan secara resmi memulai Tahap Implementasi.

Dari Perlindungan Menuju Pengakuan: Memajukan Keadilan Inklusif

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pertemuan perencanaan Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan pada tanggal 22-23 Desember 2025, yang mempertemukan perwakilan dari seluruh unit Mahkamah Agung, organisasi penyandang disabilitas, dan mitra lembaga penelitian.

Pertemuan ini menandai upaya kolektif yang signifikan dan pergeseran perspektif yang jelas—dari perlindungan paternalistik menuju pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas. Sepanjang tahap awal program, AIPJ3 mendukung serangkaian dialog publik yang berujung dengan peluncuran Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2025 tentang Pedoman Penanganan Kasus Penyandang Disabilitas yang Berkonflik dengan Hukum pada 20 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Suharto, yang juga menjabat sebagai ketua kelompok kerja, menekankan bahwa mandat kelompok kerja adalah untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam sesi diskusi, perwakilan dari unit-unit Mahkamah Agung membagikan pengalaman dalam menjalankan prioritas untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika mengakses keadilan. Pertemuan tersebut juga menampilkan presentasi dari Divisi Psikiatri Forensik Universitas Indonesia tentang spektrum disabilitas psikososial dan pendekatan penilaian praktis dalam kolaborasi dengan lembaga penegak hukum.

Turut menyuarakan pentingnya kolaborasi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), Bambang Myanto, menggarisbawahi bahwa, “Penting untuk memperkuat koordinasi antar unit di Mahkamah Agung dan dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk organisasi penyandang disabilitas, khususnya dalam melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi.”



Peserta Kelompok Kerja Akses Keadilan dari Mahkamah Agung, masyarakat sipil, dan tim AIPJ3, dengan narasumber dari Divisi Psikiatri Forensik Universitas Indonesia (atas perkenan Mahkamah Agung)

Lebih lanjut, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), menyorot bahwa berdasarkan pengalaman program pendampingan bagi 152 pengadilan di seluruh Indonesia, penguatan perspektif pengadilan tentang disabilitas tetap menjadi prioritas utama. SAPDA merekomendasikan agar penanganan kasus inklusif disabilitas terintegrasi dalam kurikulum pelatihan pengadilan dan mengundang penyandang disabilitas sebagai narasumber. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas psikososial, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), menganjurkan agar dukungan bagi penyandang disabilitas psikososial untuk mengambil keputusan diprioritaskan sebagai pendekatan hukum resmi daripada perwalian.

Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan mengenai delapan prioritas tindak lanjut kelompok kerja. Prioritas tersebut meliputi pengembangan pedoman teknis untuk mengklarifikasi ketentuan-ketentuan utama Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2025—seperti identifikasi dini, penilaian personal, pemeriksaan kesehatan mental, dan perwalian—serta pembuatan FAQ praktis untuk hakim dan petugas pengadilan. Prioritas lainnya termasuk standarisasi infrastruktur pengadilan yang mudah diakses, penguatan kapasitas peradilan, indeksasi dan peninjauan keputusan pengadilan yang melibatkan penyandang disabilitas, dan peningkatan data terpilah untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti.



Rapat Perencanaan Kelompok Kerja Akses Keadilan

Duta Adipangastuti: Menyebarkan Nilai-Nilai Perdamaian dan Aksi Toleransi



Siswa dari sekolah-sekolah Adipangastuti yang terlibat menampilkan pertunjukan seni selama pelatihan

Pada 9 Desember 2025, Walikota Surakarta, Respati Ardi, secara resmi membuka pelatihan dua hari bagi Duta Adipangastuti di Solo. Pelatihan ini diikuti oleh 58 pelajar dari sekolah menengah atas yang menerapkan Sekolah Adipangastuti di seluruh Jawa Tengah, bersama perwakilan dari 11 cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Program pelatihan ini membekali pelajar dengan kompetensi kunci, termasuk kepemimpinan yang tangguh dan berdampak, kreativitas digital yang bertanggung jawab, dan promosi kesetaraan gender di antara teman sebaya serta dalam konteks kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Walikota Ardi menekankan peran penting Duta Adipangastuti sebagai agen perubahan di sekolah mereka—membantu mencegah kekerasan, mempromosikan keberagaman, dan menumbuhkan pengembangan karakter yang empatik.



Seorang siswa yang ikut serta dalam tur jalan kaki ke klenteng Tionghoa dalam sesi diskusi

Sekolah Adipangastuti adalah model sekolah toleransi yang berlandaskan nilai-nilai budaya Jawa, yaitu *hasthalaku*. Diprakarsai pada 2018 oleh Solo Bersimfoni dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan dukungan dari AIPJ2, *hasthalaku* mencerminkan delapan nilai inti: *gotong royong*, *grapyak semanak* (ramah tamah), *guyub rukun* (kerukunan), *lembah manah* (rendah hati), *ewuh pekewuh* (saling menghormati), *pangerten* (saling menghargai), *andhap asor* (berbudi luhur), dan *tepa slira* (tenggang rasa). Kini memasuki tahun ketujuh, dan sebagai bagian dari kegiatan *bridging fund* AIPJ3, pendekatan 67 sekolah menengah atas di 33 kota dan kabupaten di Jawa Tengah telah menerapkan pendekatan Adipangastuti.

Sementara itu, Staf Ahli Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Muhammad Suaib Tahir, menyoroti pentingnya kaum muda menjaga keharmonisan baik di ruang fisik maupun digital. “Generasi muda bisa menjadi panutan lewat tindakan sehari-hari yang sederhana namun konsisten—seperti menahan diri dari ujaran kebencian, menolak perundungan, menghormati perbedaan, dan mengelola konflik dengan dialog,” [ujar Bapak Suaib Tahir pada acara tersebut](#).

Melalui Sekolah Adipangastuti, Solo Bersimfoni tetap berkomitmen untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), khususnya dengan memperkuat nilai-nilai toleransi, berpikir kritis, dan pendirian perdamaian di sektor pendidikan lokal.

Usai pelatihan, para peserta mengikuti tur jalan kaki ke berbagai tempat ibadah di Surakarta—termasuk Masjid Agung, gereja-gereja, klenteng Tionghoa, dan situs bersejarah lainnya—yang memungkinkan peserta menghayati tradisi harmoni keagamaan yang telah lama berlangsung. Di penghujung rangkaian acara, Solo Bersimfoni menyelenggarakan sesi penghargaan bagi pemenang Lomba Poster Sekolah Adipangastuti 2025, serta memperlihatkan perubahan signifikan di Solo sejak Solo Bersimfoni berkecimpung dalam pencegahan ekstremisme kekerasan bersama AIPJ mulai 2017.

Daftar Sekarang untuk Studi Singkat Australia Awards tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Reformasi Sektor Keadilan dan Keamanan

Australia Awards di Indonesia, bekerja sama dengan AIPJ3, membuka pendaftaran untuk Studi Singkat Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Reformasi Sektor Keadilan dan Keamanan, yang dirancang untuk memperkuat sistem peradilan berbasis data dan berpusat pada masyarakat. Peserta akan mempelajari wawasan praktis tentang penggunaan teknologi dan data untuk meningkatkan perumusan kebijakan, penyediaan layanan, transparansi, dan akses keadilan melalui berbagai metodologi pembelajaran.

Studi singkat ini ditujukan bagi manajer dan profesional tingkat menengah dari lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, pengadilan, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan sektor swasta. Perempuan dengan latar belakang rentan dan penyandang disabilitas didukung untuk mendaftar. Peserta akan menerapkan



pembelajaran mereka melalui *Award Project*, yang berfokus pada implementasi peningkatan di lembaga masing-masing.

Studi ini mencakup lokakarya pra-kursus tiga hari di Indonesia, kursus dua minggu di Australia, dan lokakarya pasca-kursus tiga hari di Indonesia.

Daftar secara [daring](#) melalui tautan ini paling lambat 12 Februari 2026, pukul 23.59 WIB. Untuk detail lebih lanjut, silakan kunjungi [halaman ini](#).

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi shortcourse@australiaawardsindonesia.org

KataHukum.id - Membawa Informasi Hukum Bagi Semua Khalayak

Pada 2 Desember 2025, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menerbitkan konten edukasi tentang bentuk kekerasan seksual melalui gambar intim tanpa persetujuan sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender di platform [KataHukum.id platform](#).

KataHukum.id adalah portal informasi hukum yang menyediakan penjelasan isu-isu hukum yang mudah diakses dan dipahami. Dikembangkan dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui AIPJ2 sejak November 2023, IJRS mengelola platform dan saat ini bekerja sama dengan enam mitra masyarakat sipil*. Kolaborasi meliputi fokus dalam kegiatan berbagi informasi dan mengembangkan kampanye bersama terkait perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pemberdayaan hukum, proses peradilan, dan bantuan hukum.

Dengan format Tanya Jawab (Q&A) sebagai salah satu fitur utamanya, KataHukum.id telah mempublikasikan 272 entri Q&A dan menjangkau 2230 pengguna hingga 16 Desember 2025. Selain konten Q&A, platform ini juga menyediakan [terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \(KUHP\) Belanda](#), yang berfungsi sebagai referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi untuk mendukung analisis reformasi hukum komparatif. Mengingat KUHP 1981, yang merupakan pembaruan dari *Het Herzien Indonesisch Reglement* warisan Belanda, membuat peradilan pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda.

“Sektor hukum seringkali dianggap sebagai bidang dengan istilah teknis yang kompleks dan konsep yang berbelit-belit. Visi besar kami adalah agar KataHukum.id menjadi portal informasi hukum yang komprehensif, terkini, dan mudah diakses serta berfungsi sebagai platform pendidikan publik yang andal bagi masyarakat dari semua lapisan,” tutur M. Rizaldi, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif IJRS.

Kini IJRS berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk menjajaki integrasi antara portal KataHukum.id dan portal informasi hukum BPHN, sebagai upaya memperkuat dan memperluas akses publik terhadap informasi hukum di seluruh negeri.

*Mitra masyarakat sipil meliputi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Asosiasi LBH Apik Indonesia, Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, dan Rumah KitaB (Rumah Kita Bersama).



Tangkapan layar [konten Instagram katahukum.id tentang kekerasan berupa gambar intim tanpa persetujuan](#) yang diunggah pada 2 Desember 2025

Mewujudkan Undang-Undang Narkotika yang Lebih Humanis, Efektif, dan Berkeadilan: Rekomendasi Utama dari Seminar Publik BNN



Pembukaan Seminar Publik bersama Pemangku Kepentingan Utama BNN

Pada 9 Desember 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan seminar publik untuk membahas usulan perubahan Undang-Undang Narkotika Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan kerangka peraturan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

Isu-isu utama yang mendorong usulan amandemen tersebut meliputi kebutuhan memperjelas definisi dan pembedaan antara pengguna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, kurir, dan pengedar ilegal; mengenali kelompok rentan yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika; dan menjelaskan perbedaan antara kepemilikan, niat untuk mendistribusikan, memproduksi, dan memperdagangkan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil di muka hukum. Kegiatan ini menjadi bagian dari kemitraan dengan AIPJ3 karena pidana penjara bagi pengguna narkotika menyebabkan kepadatan lapas sehingga pendekatan alternatif cukup mendesak.

Seminar ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor penegakan hukum, kesehatan masyarakat, dan hubungan sosial, termasuk perwakilan dari universitas, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi hukum. Kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam seminar membagikan pengalaman seputar permasalahan dan rekomendasi terkait tata kelola dan manajemen yang lebih baik dalam menangani pelaksanaan penegakan hukum, perdagangan ilegal, kepadatan lapas, dan rehabilitasi.

Selain itu, salah satu hal yang diangkat dalam seminar tersebut disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang mempresentasikan studi kasus pengalaman perempuan dan penyandang disabilitas yang didakwa dengan pelanggaran tindak pidana narkotika. Presentasi tersebut menggarisbawahi bagaimana kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang tidak

setara, stigma sosial, dan tekanan sosial-ekonomi berkontribusi pada kerentanan dan keterlibatan mereka dalam kasus-kasus terkait narkotika, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan kebijakan narkotika yang peka gender dan inklusif.

Para peserta juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk meningkatkan peran Tim Asesmen Terpadu dalam mengidentifikasi dan menilai kasus penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lainnya, serta mengkategorikan zat psikoaktif baru. Selain itu, diskusi tersebut menyoroti perlunya alokasi sumber daya yang memadai untuk penanganan kesehatan masyarakat dan pengurangan dampak buruk, termasuk layanan rehabilitasi berkelanjutan dan sistem dukungan berbasis masyarakat.

“BNN terbuka terhadap seluruh masukan dan bentuk perubahan dalam RUU Narkotika selama didasarkan pada kajian ilmiah dan praktik di lapangan. Reformasi kebijakan harus memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan, dan kemanfaatan yang optimal agar penanganan narkotika benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Agus Irianto, Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, [pada seminar tersebut](#).

Masukan dan tanggapan lebih lanjut disampaikan oleh perwakilan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Center for Drug Research (ICDR), dan Perhimpunan Advokat Indonesia—Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI). The Asia Foundation telah mendukung Pemerintah Indonesia selama AIPJ2 melalui penelitian, diskusi kebijakan, dan konferensi tentang reformasi kebijakan narkotika. Sebagai bagian dari kegiatan *bridging fund* AIPJ3, dukungan ini berlanjut dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dan akademisi dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang sedang berjalan.



Kiri ke kanan:

- Sholihah Halim, Administration Officer, HR & Office Team
- Marie Astrid Wijaya, Partnerships Manager
- Khairunnisa Zainuddin, Activity Coordinator, Quality & Learning Team
- Taufiqurrohman, Grants & Contract Coordinator, Grants & Contract Team
- Nanda Aprilia, Digital Analytics Coordinator, Communications Team

PRIORITAS KEBIJAKAN AIPJ3



Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 | email: aipj.info@aipj.or.id

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dan diimplementasikan oleh DT Global.